PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Juni 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUH. RUSLI**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **509824**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 950.000.000

1. Tanah Seluas 19.947 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 19.947 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 19.947 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/78 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 700.000 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 303.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VINO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

2. MOTOR, HONDA DIBO2N13L2A/T SPM R2/SCOOTER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, MITUSUBISHI L300 PICP UP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**12.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**7.600.000.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**8.865.000.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**8.865.000.000**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.